



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH SINDUMARTANI
NOMOR : 56/Kep.Lur/2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK)
KALURAHAN SINDUMARTANI,

LURAH SINDUMARTANI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang NNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu yang Dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Sindumartani tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) Kalurahan Sindumartani;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) Kalurahan Sindumartani sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Sindumartani dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- KEEMPAT** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sindumartani
pada tanggal 18 Agustus 2026

LURAH SINDUMARTANI,



ANANG ZAMRONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SINDUMARTANI
NOMOR 56/Kep.Lur/2026
TENTANG PENETAPAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN (DIK) DI
KALURAHAN SINDUMARTANI

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK) DI KALURAHAN SINDUMARTANI

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
				DIBUKA	DITUTUP	
1	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai : b. Dokumen pengaduan Masyarakat.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah c. Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasn Intern Pemerintah	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM c. Masyarakat tidak ragu melaporkan	a. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan ijin Lurah b. Atas persetujuan yang bersangkutan c. Sampai proses pengaduan selesai

				dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) c. Masyarakat/karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun Tindakan pelanggaran hukum	dugaan pelanggaran kode etik profesi	
2	Penegakan Hukum	a. Identitas para pihak yang bersengketa b. Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h b. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan c. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan	a. Melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih b. Menjaga rahasia Perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha c. Menjagapersaingan usaha tidak sehat	Permanen
3	Teknologi Informatika	a. Kode akses elektronik aplikasi b. Sistem Keamanan Informasi	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, c, i dan j b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan	a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi	Selama kode masih digunakan

			Pasal 1 angka 6 c. Perbub Nomor 140 tahun 2022 (SKAAD)	potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	kerugian	
		Internet protocol/IP Address Private	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c, i dan j d. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Perbub Nomor 140 tahun 2022 (SKAAD)	a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi b. Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual b. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Selama masih digunakan/berlaku
		Username dan Password Aplikasi Internal	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan
4	Data dan dokumentasi kependudukan	a. Database kependudukan b. Data pribadi transmigran c. Data pribadi pelaku usaha d. Data debitur dana	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan j b. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang	- Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	a. Permanen b. Mendapat ijin dari yang bersangkutan c. Dikecualikan

		bergulir e. Data pribadi pemohon ijin f. Data penyandang gizi buruk	Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Poin 22 Pasal 2 Pasal 84 ayat (1) dan (2) Pasal 85 ayat (1),(2), dan (3) c. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat (1) d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Pasal 59	- Bertentangan dengan hak pribadi/ privasi yang berpotensi disalahgunakan		untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/ hukum)
5	Data pribadi	Data bekas tahanan politik Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan c. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981 tentang	a. Penyalahgunaan NIK b. Dapat memicu konflik antar Masyarakat c. Dapat mengungkapkan data rahasiapribadi yang	a. Menghindari konflik antar Masyarakat b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan c. Melindungi harkat martabat yang bersangkutan	Permanen

			Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia	bersangkutan d. Dapat memunculkan stigma negatif di Masyarakat	d. Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	
		Identitas eks tahanan politik dan narapidana politik	a. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h b. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	Permanen
		Nama dan alamat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di Masyarakat	a. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. UU No. 13 Tahun 2011 Penanganan Fakir Miskin d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan e. Perda DIY No 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan f. Pasal 64 huruf i UU No. 35 Tahun 2002 tentang	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)

			Perlindungan Anak			
		Data pertanahan dalam Buku Tanah Desa (Letter)	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h;	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	- Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan - Mendapat persetujuan dari yang bersangkutan - Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum dan pengadilan
6.	Data pribadi binaan di UPTD Dinas Sosial (Balai-balai Rehabilitasi Dinas Sosial)	a. Data pribadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial b. Data pribadi Bantuan Sosial Pangan c. Data pribadi Data Bantuan Sosial tunai d. Data pribadi Peserta Bayar Iuran JKN dan	a. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf h b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. UU No. 13 Th 2011 penanganan fakir miskin.	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Melindungi klien dari Tindakan diskriminasi dan stigma negatif	a. Kecuali apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan b. Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka

		APBD e. Data pribadi penerima PKH	d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang pedoman pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2			penyelenggaraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7.	Rehabilitas Dinas	Dokumen proses a. Data pribadi Data Bantuan Sosial Tunai b. Data pribadi Peserta bayar Iuran JKN dan APBD c. Data pribadi penerima PHK	a. UU No. 14 tahun 2008 manusia b. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2	Mengganggu proses	a. Mengamankan atau diskriminasi dan stigma negatif	Sampai dengan ??? a. Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraa n kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8.	Data kepegawaian	Dokumen Kepegawaian : a. Data pribadi pelamar pamong b. Biodata pamong dan staf yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, no telpon, alamat, data Riwayat keluarga pegawai, NPWP dan No kepesertaan BPJS c. Hasil Uji Kesehatan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai b. Dapat menghambat proses penegakan hukum c. Dapat menghambat	a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama menjadi Pamong/staf

		Pegawai d. Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assessment pamong e. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib		proses penyusunan kebijakan		
		Dokumen proses pengangkatan, dan pemberhentian Pamong/ Staf	a. UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j	Mengganggu proses pengambilan keputusan	a. Mengamankan tau memperlancar proses penyusunan keputusan b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja c. Menghindari Tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang	Sampai dengan terbitnya SK
		Dokumen proses pemilihan /pengusulan/pengesahan dan pemberhentian Lurah	a. UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j	Mengganggu proses pengambilan keputusan	a. Mengamankan tau memperlancar proses penyusunan keputusan b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja c. Menghindari	Sampai dengan terbitnya SK

					Tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang	
9	Kearsipan	Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia dan konfidensial	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j b. UU No.43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah d. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata naskah Dinas e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan	Tidak terbatas

			Tahun 2021 Tentang Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas g. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan			
		Notulen rapat rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j	Membahayakan keamanan	Melindungi informasi rahasia yang dilindungi undang-undang	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6 c. UU NO. 14 Tahun 2008 tentang

						Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h d. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6
		Nota Dinas. Memo dan disposisi pimpinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j b. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja	Mengikuti jadwal retensi arsip
		Berita dan/atau dokumen yang berklasifikasi terbatas, rahasia, sangat rahasia	Pedoman kepala Lembaga Sandi Negara No. 5 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan	Mengganggu Stabilitas	Terciptanya Stabilitas	30 th/ selama jangka waktu yang ditetapkan

10	Laporan	Laporan Hasil Pemeriksaan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Tahun 2011	Dapat menimbulkan stimulasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan/ penilaian antara birokrasi dan masyarakat	Rekomendasi/pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan system tata kelola	
		Laporan Keuangan yang terdiri dari : a. Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum di audit, LKJ, LKPJ) b. Laporan reviu keuangan yang belum di audit c. Dokumen perolehan aset	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf 1 dan j b. Uu No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1); c. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan tanggung Jawab Negara pasal 19 d. Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/20	a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan b. Mengganggu proses audit	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan b. Melindungi penyalahgunaan	a. Sampai menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) diterima DPR b. Sampai dengan terbitnya audit

			08 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Inter Pemerintah e. Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah f. Permendagri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementrian Dalam Negri Dan Pemerintah Daerah Pasal 5 ayat 4 huruf e		data/informas	
11	Pegadaan Barang/Jasa	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, Terkait : a. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan b. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan	a. Uu No. 14 Th 2008 tantang KIP, Pasal 17 huruf b, I dan j b. UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang c. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 d. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Indormasi Yang Dikecualikan di	a. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa c. Berpotensi	a. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai demgam prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pegadaan barang/jasa c. Dapat menjamin	a. Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang b. Kepentingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang

		d. Tahapan Monitoring dan Evaluasi e. Peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP f. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas g. Peraturan Menteri Dalam negri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah daerah h. Perlem LKPP No.07 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah i. Perlem LKPP No.09 tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia	disalahgunakan oleh pihak luar d. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat	obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran d. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi e. Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja	
--	--	--	--	--	--



LURAH SINDUMARTANI,

ANANG ZAMRONI